

BOOK REVIEW

Meneropong Agenda Penjinakkan Politik Islam di Indonesia

Zelfeni Wimra

(Dosen Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol. Email: zelfeniwimra@gmail.com)



Judul: Menjinakkan Islam, Strategi Politik Orde Baru

Penulis: Tabrani Syabirin

Halaman: xii + 270 halaman

Penerbit: Teras, Jakarta

Cetakan: Pertama

Tahun: Desember, 2014

DEMOKRATISASI REZIM DAN PASANG SURUT ISLAM POLITIK

Pengantar buku *Menjinakkan Islam, Strategi Politik Orde Baru* ini ditulis oleh Fadlizon, Wakil Ketua DPR RI (2014-2015), bertajuk *Kekuatan Islam Politik dalam Pentas Demokrasi*. Fadlizon mengemukakan kilasan sejarah Islam dan umat Islam dalam tradisi politik di Indonesia. Sebagai kelompok mayoritas dalam populasi, umat Islam Indonesia sangat berpengaruh terhadap arah pembangunan demokrasi. Meskipun demikian, dalam perjalanannya Islam Politik di Indonesia telah mengalami pasang surut, terutama dalam hubungannya dengan rezim yang tengah berkuasa.

Saham Islam Politik dalam pembangunan Indonesia sebagai sebuah negara juga tidak sedikit. Terbentuknya Sarekat Islam pada masa pra-kemerdekaan memiliki kontribusi signifikan dalam

membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia atas ketertindasan yang dialaminya. Secara prinsip, cara berpikir tokoh Islam di masa itu tergerakkan oleh argumentasi Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwa implementasi rukun Islam tidak akan terlaksana kecuali dengan kekuatan kekuasaan atau kepemimpinan (Taimiyah, 1991:149). Kehadiran tokoh-tokoh Islam seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari hingga Muhammad Natsir juga merupakan bukti kontribusi umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan Partai Masyumi yang terbentuk setelah Indonesia merdeka tercatat sebagai salah satu partai Islam terbesar Indonesia saat itu di Asia Tenggara bahkan Asia. Sehingga kehadiran Islam Politik di Indonesia memiliki tempat yang penting dalam pembentukan dan pembangunan demokrasi hingga saat ini.

Namun, pada saat yang bersamaan, eksistensi Islam Politik di Indonesia dalam perjalanannya juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Sepanjang Pemilu Orde Lama dan Orde Baru, Partai Islam belum bisa mencatatkan dirinya sebagai pemenang pertama. Padahal, lebih dari 87 % penduduk Indonesia beragama Islam.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, umat Islam menaruh optimisme untuk kembali memainkan peranan dominan dalam politik Nasional, mengingat sumbangan mereka dalam meruntuhkan rezim Orde Lama. Kerja sama antara ABRI, organisasi mahasiswa, dan kelompok Islam dalam menjatuhkan PKI dan Bung Karno setelah terjadinya G 30 S/PKI memberikan indikasi bahwa Islam mendapatkan legitimasi dalam peran politiknya. Tetapi optimisme itu buyar ketika ABRI menyatakan PKI dan Masyumi sebagai partai terlarang, karena dianggap pernah menyeleweng dari Pancasila dan UUD 1945. Setelah Masyumi dinyatakan sebagai partai terlarang, kedudukan dan peranan politik Islam

berada di posisi pinggiran. Walaupun secara politis, peranan umat Islam bersifat marginal, sampai saat ini mereka adalah kelompok strategis yang banyak dipertimbangkan, seperti terlihat pada setiap pemilu; isu-isu yang menonjol menjadi tema kampanye selalu berkisar tentang Islam.

Memasuki era reformasi, fenomena ini semakin menarik ditandai dengan marak terbentuknya partai-partai berbasis Islam. Hal ini tidak terlepas dari disahkannya UU No. 2 tahun 1999 yang mengganti UU No. 3 tahun 1985 tentang ideologi papol. Undang-undang baru tersebut mengizinkan partai bisa berdiri atas asas yang beragam, tidak hanya Pancasila. Pada tahun 1999, terdapat 9 partai politik Islam yang berpentas pada Pemilu saat itu. Hasilnya, jumlah mencapai 34,2 persen. Perolehan ini menurun jika dibanding dengan perolehan suara partai-partai Islam pada tahun 1955 yang mencapai 43,7 persen.

Perolehan suara partai Islam sempat meningkat pada pemilu 2004 dengan persentase 38,1 persen. Namun pada pemilu 2009 mengalami penurunan yang cukup tajam hingga hanya mendapatkan 23,1 persen. Pemilu 2014 partai Islam kembali menunjukkan hasil yang positif. Di tengah prediksi lembaga survey yang memperkirakan perolehan suara partai Islam hanya 21 persen hasil akhir menunjukkan kebalikannya. Partai Islam kembali memetik peningkatan suara menjadi 32 persen pada pemilu 2014.

Melihat perjalanan Islam Politik di Indonesia yang sangat dinamis, menurut Zon, terjelaskan oleh sejumlah faktor. Mulai dari adanya fenomena *Islam Yes, Partai Islam No* yang dideklarasikan oleh Nurcholis Madjid pada tahun 1970-an, maraknya tindakan anarkisme yang mengatasnamakan Islam, minimnya pendanaan, hingga semakin

kencangnya bandul religiusitas partai nasionalis yang telah mengambil ceruk partai Islam. Kombinasi faktor-faktor tersebut memunculkan resultan tidak begitu kuatnya warna Islam Politik ketika diterjemahkan pada momen pemilu (Azra, 1996:26).

SEBUAH RENUNGAN KEISLAMAN

Buku ini diawali penulisnya (Tabrani Syabirin) dengan petikan renungan mengenai umat Islam Indonesia yang gampang pecah menghadapi situasi politik negara. Sebagai kelompok yang mayoritas, hal ini merupakan kerugian politik Islam terbesar di Indonesia. Hal ini sebenarnya disadari oleh segenap intelektual Islam. Uraian kajian terkait sudah banyak dikemukakan sebagai aba-aba akan ancamannya. Pada saat yang sama, sebagian besar umat Islam lain memang tidak punya kepedulian tentang hal ini. Mereka adalah mayoritas yang diam. Walaupun ada gerakan, hanya semata mobilitas pemenuhan kebutuhan jasmani yang didesak oleh hasrat konsumerisme, oleh kecemasan akan ancaman hidup ditekan kemiskinan.

Bukan pula berarti, Islam sebagai gerakan tidak pernah “ada” di Indonesia. Spirit nasionalisme pada mulanya berkobar dari semangat cinta tanah air yang dikampanyekan para ulama. Semangat ini menyusup ke dalam darah-daging para pejuang kemerdekaan. Tabrani secara khusus mendedahkan data seputar kehadiran Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang diprakassai salah satunya oleh proklamator Indonesia, Moh. Hatta. Pada bab demi bab pembahasannya, buku ini menyuling inti sejarah tersebut, di mana Islam membakar cita-cita bersama rakyat Indonesia untuk memiliki sebuah payung bersama bernama negara. Gelora

pergerakan keislaman yang sama pun terjadi di dunia Islam lain di dunia. Ada sejumlah penafsiran baru dan Islamisasi dalam upaya-upaya perubahan tatanan sosial-politik yang terinspirasi dari spirit keislaman (Kartanegara, 2003:vii-xiv).

DINAMIKA POLITIK ORDE BARU

Dinamika politik Orde Baru sebagai seting penelitian buku yang awalnya tesis penulis pada Program Pascasarjana (S-2) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998, diuraikan dengan pencermatan mendalam terhadap kiprah sejumlah tokoh penting di belakang kekuasaan Orba. Sejumlah nama dari kalangan militer dan pengusaha yang “merajalela” di tubuh Orba memperkuat alasan mengapa ketika memasuki dekade ke-empat Orba harus diruntuhkan. Penulis menguraikan dengan detail apa sesungguhnya agenda Orba yang memanfaatkan kekuatan militer untuk kestabilan politik dan ekonomi. Juga disebutkan kecerdikan Soeharto membuat terobosan menjadikan Golkar sebagai alat konsolidasi kekuatan dan kekuasaan. Dengan langkah itu, ia memberangus oposisi ekstrem kiri dan ekstrem kanan, di samping terus merawat kedekatan dengan oposisi loyal.

Setelah negara terbentuk pun, semangat Islam masih menjadi perisai untuk menangkis bahaya laten yang mengancam kedaulatan negara, semisal G 30 S PKI. Katakanlah ini merupakan strategi Islam politik memahami arah semangat zaman. Meskipun pada dekade sebelumnya, semangat tokoh-tokoh Islam yang kritis terhadap corak kepemimpinan Orde Lama telah membuat cemas pemerintah pusat. Kupasan ini dengan apik tersusun dalam bab Kegagalan G 30 S PKI dan lahirnya Orde Baru (hal.11-36). Dikembangkan

Tabrani, bagaimana kaitan gerakan partai Islam dan Piagam Jakarta; bagaimana kaitan partai Islam dengan arah politik Soekarno, serta bagaimana pula kemudian kegagalan G 30 S PKI menjadi motif lahirnya Orde Baru.

Dari kecenderungan politik Orba yang sedemikian disiplin, buku ini menemukan selubung strategi yang secara halus dan bahkan kasar berindikasi “menjinakkan” Islam. Islam dalam konteks ini dipandang “liar” dan “buas” terhadap kehendak penguasa Orba. Itikad ini terbaca pada kebijakan membatasi ruang gerak Islam politik dengan meraih simpati umat Islam yang awam politik. Keberadaan Ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dicurigai sekaligus dihargai; ditentang sekaligus disayang. Arah kehidupan privat umat Islam dimediasi sekaligus dibatasi, seperti kelahiran UU Perkawinan 1974. Ormas Islam dibiarkan tumbuh asalkan asas tunggal pancasila dijunjung setinggi-tingginya. Misal lain, resistensi larangan jilbab dan legalisasi SDSB (Woodward, 1999:55).

Sepanjang dinamika itu berlangsung, Islam politik pada dasarnya tidak tinggal diam. Selalu ada upaya elitnya mencari titik temu dengan kehendak pemerintah. Kerjasama ekonomi dengan lembaga-lembaga korporatis Orba juga diterus diupayakan terjalin. Terlepas dari evaluasi yang mesti harus dilakukan hingga saat ini, lahirnya Bank Mu’amalah salah satu bukti upaya sinergisasi kubu ekonomi pemerintah Orba dengan kubu ekonomi berbasis Islam.

Andaikata kompleksitas pertarungan politik Orde Baru dengan Islam sebagai dinukilkan dalam buku ini hanya terjadi pada masa Orde Baru, kiranya tidak begitu penting membaca penafsiran penulis terhadap terma ini. Akan tetapi, pada bagian akhir pembahasannya,

penulis memberikan isyarat, bahwa pandangan terhadap Islam yang “liar” dan “buas” itu akan terus berevolusi dalam sejumlah konsep elit politik di Indonesia. Selalu ada alasan untuk menjinakkan Islam sebagai gerakan politik. Tentu, tidak terkecuali pada rezim yang berencana akan merevolusi mental bernegara dan berbangsa ini. Argumentasi ini penting dibuktikan dengan mengungkap, jangan-jangan yang sedang terjadi sesungguhnya adalah pertarungan saling jinak-menjinakkan. Maka, untuk memaknai diskursus ini lebih dalam, buku ini rekomendatif untuk dijadikan rujukan.

Hubungan antagonis antara negara Orba dengan kelompok Islam dapat dilihat dari kecurigaan yang berlebihan dan pengekan kekuatan Islam yang berlebihan yang dilakukan Presiden Soeharto. Sikap serupa merupakan kelanjutan dari sikap kalangan nasionalis sekuler terhadap kelompok Islam, khususnya di era 1950-an. Kecenderungan akomodatif negara terhadap Islam lebih disebabkan oleh pemahaman negara terhadap perubahan sikap politik umat Islam terhadap kebijakan Negara, terutama dalam konteks pemberlakuan dan penerimaan asas tunggal Pancasila. Perubahan sikap umat Islam pada paruh kedua 1980-an, dari menentang menjadi menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bersinergi dengan sejumlah kebijakan Orde Baru yang menguntungkan umat Islam pada masa selanjutnya (an-Na'im, 2007:391).

KEGAGALAN G30S PKI DAN LAHIRNYA ORDE BARU

Salah satu momen sejarah yang mungkin paling membekas dalam perjalanan sejarah Indonesia adalah Peristiwa Gerakan 30 September

1965. Peristiwa tersebut sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi dalam pengungkapan fakta yang sebenarnya. Berbagai versi tentang gerakan 30 S tersebut telah dikemukakan diantaranya; Peristiwa G 30 S versi Pemerintah Orde Baru yakni peristiwa 30 S merupakan suatu tindakan makar yang dilakukan oleh PKI terhadap pemerintah Indonesia yang sah. Tindakan kudeta tersebut dilakukan untuk merebut kekuasaan dari Ir. Soekarno selaku Penguasa Tertinggi.

Pemaparan sejarawan mengenai kaitan partai Islam dan piagam Jakarta, partai Islam dan Soekarno, seterusnya kegagalan G30S PKI dan lahirnya Orde Baru, masih terus berlangsung. Pemahaman yang mutakhir belum dapat dikatakan finalisasi dari kemelut sejarah perjalanan politik keindonesiaan tersebut. Belum lagi mernut, bagaimana pula Islam sebagai gerakan memainkan peran politik di dalamnya.

Salah satu upaya kelompok Islam politik adalah merubah mencoba memasukan tujuh kata seperti yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Ini bisa kita lihat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, dimana UUD 45 sebagai dasar negara Indonesia tidak lahir begitu saja, namun melalui suatu proses yang panjang dan perdebatan-perdebatan yang alot (Pamungkas, 2011:176). Tabrani Syabirin menyebut bahwa ada dua kalangan yang diwaspadai di era orde baru; Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berideologikan komunisme dan kelompok Islam yang diduga mempunyai keinginan untuk mendirikan negara Islam seperti yang dilakukan kelompok Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII). Islam politik dianggap menjadi ancaman dan sumber konflik yang dapat mengganggu stabilitas politik. Pemberontakan yang dilakukan PKI dengan mencoba merebut kekuasaan di Madiun serta memproklamasikan berdirinya “Soviet

Republik Indonesia” dan membentuk pemerintah Front Nasional yang jelas-jelas menyalahi dan mengkhianati Proklamasi 17 Agustus 1945. Tapi akhirnya TNI bisa merebut Madiun kembali dan menembak mati muso, tokoh-tokoh PKI seperti Amir Sjarifuddin, Suripno, Sardjono, Harjono, dan Djokosujono juga terbunuh. Sedangkan anggota PKI yang berhasil melarikan diri, seperti Abdul Madjid, Alimin, Ngadiman, Hardjosuprpto, D.N. Aidit, Nyoto, Tan Ling Djie, dan Sumarsono (Syabirin, 2014:36-43).

ORDE BARU DI PENTAS POLITIK NASIONAL

Fase orde baru merupakan catatan penting dalam sejarah kalangan Islam politik. Sedari awal, penulis buku ini menegaskan tentang posisi negara terhadap kalangan Islam, yakni menjinakkan. Perjalanan Islam politik di Indonesia, sangat dinamis. Ada banyak faktor yang menjelaskan situasi tersebut. Salah satunya fenomena Islam Yes, Partai Islam No yang dideklarasikan oleh Nurcholis Madjid pada tahun 1970-an. Buku berjudul “Menjinakan Islam Strategi Politik Orde Baru” yang ditulis oleh “Tabrani Syabirin” ini menjelaskan tentang bagaimana perjuangan politik Islam untuk Indonesia dan sikap pemerintah terhadapnya.

Gerakan-gerakan Islam politik di masa Orba hampir bisa dikatakan mati, mereka tidak dapat berbuat apa-apa melawan sikap keras rezim Orba. Ali Murtopo, seorang kepercayaan presiden dan menjadi asisten pribadi presiden, telah berhasil menciptakan image di masyarakat bahwa Islam senantiasa menjadi rival dan musuh Pancasila. Penjinakan terhadap kalangan politik Islam seperti yang menimpa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Di awal lahirnya Orba, tokoh-tokoh Muhammadiyah hendak mendirikan partai baru

bernama PII (Partai Islam Indonesia). Kegagalan pendirian PII tidak lepas dari ketidaksetujuan pemerintah atas berdirinya PII, seperti Bung Hatta yang gagal mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) (Syabirin, 2014:168).

Begitu juga dengan NU. Hal menarik terjadi di tahun 1967 di saat DPR menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) yang mengusulkan pemilu menggunakan sistem distrik yang memberikan jatah 50% kursi di DPR. Tentu saja sistem distrik ini tidak disetujui oleh NU. Sistem distrik akan memangkas kekuatan NU karena di luar Jawa massa NU relative sedikit. Pemberian jatah 50% untuk ABRI juga akan mengelimerkan kekuatan NU di DPR (Syabirin, 2014:175). Begitu juga dengan langkah yang dilakukan pemerintah otoriter Orba adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1969 yang terkenal dengan akronim Permen, yang secara tidak langsung mendorong anggota-anggota departemen meninggalkan partai politik. Tentu hal ini merugikan partai politik NU dan lainnya, karena sebagian simpatisan dari mereka berada di birokrasi (Syabirin, 2014:181).

Strategi orde baru terhadap kalangan Islam politik sesungguhnya tidak linier. Abdul Aziz Taba menunjukkan ada tiga model hubungan kalangan Islam dengan negara pada era orde baru. Perama adalah model antagonistik yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1982. Kedua, hubungan yang bersifat resipokral kritis. Era ini terjadi pada 1982 hingga 1985. Ketiga, hubungan akomodatif yang tercermin pada tahun 1985 hingga 1996.

Buku ini, sesungguhnya bukan karya pertama yang menjelaskan dinamika Islam dan orde baru. Ada karya lain seperti Islam dan Negara yang ditulis oleh Bachtiar Effendi. Jika dibandingkan dengan bukunya Bachtiar, karya Tabrani memang agak longgar dalam pengambilan

data. Rujukannya pun tidak cukup kaya, sehingga detail persoalan tentang dinamika Islam politik pada masa orde baru tidak bisa tersampaikan secara baik. Persoalan lain yang tampak dalam buku ini adalah ketiadaan kesimpulan yang dituju, sehingga sulit untuk mengerti maksud terdalam dari penulisan karya ini.

Syabirin mengemukakan secara terbuka bahwa Orde Baru merupakan suatu orde politik yang berlainan sama sekali dengan orde politik sebelumnya. Format politik orba ini mencoba menciptakan keseimbangan antara konflik dan consensus. Kalau pada masa Orde Lama pembangunan ditekankan pada bidang politik, maka Orde Baru mengubahnya menjadi ekonomi. Dalam bidang politik, rezim yang berkuasa dihadapkan pada upaya menciptakan sebuah format politik baru. Upaya ini secara praktis bersamaan dengan tumbuhnya optimisme masyarakat sekeluarnya mereka dari suatu masa yang merugikan. Optimisme akan kehidupan baru yang lebih baik, lebih demokratis, dan lebih aman.

Militer sebagai Kekuatan Politik Dominan

Secara teoritis, keterlibatan militer dalam politik merupakan topik yang menarik bagi para penganut politik. Kehadiran militer dalam perpolitikan nasional sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan Indonesia. Salah satu karakteristik militer Indonesia adalah berasal dari gerakan perlawanan rakyat yang pada saat itu sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dengan demikian, militer Indonesia bukan bentukan politisi sipil, bukan pila warisan penjajah Belanda dan Jepang. Bahkan bersama politisi sipil (yang berjuang lewat jalur diplomasi), militer bergandeng tangan (dengan menggunakan senjata), mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda yang bermaksud menjajah

kembali. Karakteristik militer Indonesia adalah “prajurit perang” seklaigus “pejuang prajurit”.

Pembangunan Ekonomi sebagai Prioritas

Para pendukung Orde Baru sepakat untuk memprioritaskan pembangunan ekonomi. Pilihan ini diambil sesuai dengan political will pemerintah untuk mengalihkan orientasi pembangunan pada masa Orde Lama yang ideologis-politis kepada orientasi pragmatis. Pilihan ini tepat untuk mengantisipasi gejolak masyarakat yang sekian lama hidup melarat dan menyimpan harapan baru dengan datangnya Orde Baru.

Militer yang menjadi unsur kekuatan dominan Orde Baru berkeyakinan, kesalahan politik sistem sebelumnya adalah terlalu berperannya partai-partai politik yang terpolarisasi secara ideologis dan dipusatkannya perhatian pada pembangunan politik. Militer memandang perlu menekankan pembangunan ekonomi pada masa Orde baru. Karena pembangunan ekonomi hanya bisa berlangsung dalam keadaan politik yang stabil, maka pembangunan politik menjadi alat pencapaian stabilitas itu.

Stabilitas Politik

Pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utama pembangunan membutuhkan prasyarat-prasyarat tertentu. Di bidang politik, prasyarat itu adalah stabilitas politik, yang pada dua dekade pasca kemerdekaan merupakan barang mahal dan sulit tercipta. Inilah yang menjadi sasaran utama pembangunan politik sehingga tekanannya adalah pada pendekatan keamanan (security approach), bukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).

Pencapaian dan pemeliharaan stabilitas nasional, dengan pengalaman politik sebelumnya, mengharuskan pemerintah dlam mengambil langkah-langkah berikut:

- 1) Menciptakan suatu tertib politik yang bebas dari konflik ideologis-politis.
- 2) Membatasi partisipasi politik yang pluralistik

Terbentuknya *Hegemonic Party System*

Pemerintah Orde Baru yang didominasi oleh militer memiliki persepsi yang khas terhadap partai, yaitu sebagai “pasang dalam memperoleh kekuasaan, pemberi pandangan dunia yag lain (ideology, pen.) dan penggerak kekerasan rakyat”. Sejak pemilu pertama dalam masa Orde Baru pada tahun 1971 terbentuklah sistem kepartaian yang *Hegemonic Party System* (HPS). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh La Palombra dan Weiner (1966). HPS tercipta jika suatu parpol mendominasi proses politik suatu Negara dalam dikurun waktu yag lama. Lebih jauh Weiner (1967, 1970), berdasarkan penelitiannya di Polandia, mengatakan bahwa HPS terletak di antara sistem partai dominan dan satu partai. Di dalam HPS eksistensi partai-partai dan organisasi sosial diakui tetapi peranannya dibuat seminimal mungkin, terutama dalam pembentukan pendapat umum (Nimmo, 2005:6-8).

STRATEGI ORDE BARU MENJINAKKAN ISLAM

Masa orde baru juga begitu phobia dengan komunisme yang dianggap melakukan pemberontakan yang dikenal dengan gerakan 30 (Gestapu) September tahun 1965. Setelah peristiwa Gestapu tersebut pemerintah Indonesia melarang ajaran dan ideologi komunis ada dan berkembang di Indonesia karena dengan jelas ajaran komunis bertentangan dengan Pancasila. Atas dasar pertimbangan itulah keluar TAP MPR XXVI/1966 membubarkan PKI dan melarang menyebarkan paham komunisme.

Negara Islam Indonesia (NII), yang dimotori oleh gerakan Darul Islam yang dipimpin oleh

Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo di Jawa Barat. Di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureuh, Kahar Muzakkir di Sulawesi Selatan untuk bergabung dengannya dan melantiknya sebagai Panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia (TII) yang disebut juga dengan Divisi Hasanuddin.

Merujuk kepada rumusan konsepsi dalam pemikiran politik Islam terdapat, paling tidak, tiga paradigma tentang hubungan agama dan negara. Nuansa di antara ketiga paradigma ini terletak pada konseptualisasi yang diberikan kepada kedua istilah tersebut. Kendati Islam dipahami sebagai agama yang memiliki totalitas dalam pengertian meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia/termasuk politik, namun sumber-sumber Islam juga mengajukan pasangan istilah seperti *dunya-akhirat* (dunia-akhirat), *din-dawlah* (agama-negara), atau *umur al-dunya- umur al-din* (urusan dunia-urusan agama). Pasangan istilah-istilah tersebut menunjukkan adanya perbedaan konseptual dan mengesankan adanya dikotomi.

Paradigma pertama memecahkan masalah dikotomi tersebut dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara, dalam hal ini, tidak dapat dipisahkan (integrated). Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar "kedaulatan Ilahi" (divine sovereignty), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di "tangan" Tuhan. Ajaran normatif bahwa Islam tidak mengenal pemisahan agama dari negara didukung pula oleh pengalaman umat Islam di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad.

Terkait dengan apa yang ada berdinamika di Indonesia, Syabirin mengulas kembali peristiwa yang terjadi di seputar 7 Agustus 1949, saat Kartosuwirjo memproklamasikan

berdirinya Negara Islam, proklamasi Negara Islam. Pemberontakan Darul Islam ini, baik di Jawa Barat maupun Aceh, dapat ditumpas oleh pemerintah. Dihukum matinya Kartosuwirjo pada tahun 12 September 1962 mengakhiri aktivitas Darul Islam di Jawa Barat. Sedangkan konflik di Aceh dapat diredam setelah tercapainya persetujuan dengan pemerintah, bahwa Aceh adalah Daerah istimewa.

Pemerintahan Orba yang disokong oleh ABRI menerapkan kebijakan-kebijakan yang kerap merugikan politik Islam. Salah satu alasannya adalah karena pemerintah Orba menganggap gerakan Islam politik sebagai ancaman persatuan nasional. Soeharto pun melihat kalangan Islam sebagai saingan dalam mempertahankan kedudukan sebagai presiden, maka tak heran dalam berbagai kebijakan-kebijakan Orde Baru yang berkaitan dengan partai politik selalu berusaha mematikan gerakan Islam politik (Piliang, 2011:86-87). Tiga organisasi masyarakat Islam yang secara langsung mendapatkan dampak dari terobosan politik Soeharto pada masa Orde baru adalah: Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Dewan dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) (Syabirin, 2014:154-224)

Muhammadiyah

Ketika Muhammadiyah didirikan oleh KH, Ahmad Dahlan pada tahun 1912, umat Islam sedang dalam kondisi yang sangat terpuruk, Bersama seluruh bangsa Indonesia, mereka terbelakang dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah kemakmuran dan ekonomi yang parah serta kemampuan politis yang tidak berdaya. Lebih memperhatikan lagi identitas keIslaman merupakan salah satu poin negatif kehidupan umat, Islam waktu itu identik dengan profil kaum santri yang selalu mengurus

kehidupan akhirat sementara tidak tahu dan tidak mau tahu dengan perkembangan zaman, Sementara lembaga organisasi keagamaan juga masih berkelut dengan urusan yang tidak banyak bersentuh dengan dinamika realitas sosial apalagi berusaha untuk memajukan.

Ajaran Islam seakan menjadi belenggu yang semakin membenamkan umatnya kepada situasi yang tidak berharga dan tidak berdaya, disisi lain kelompok masyarakat yang terdidik menjadi alergi dengan Islam dan kaum muslim karena dianggap sebagai sumber keterbelakangan masyarakat dan tidak bisa dijadikan jalan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Sebagaimana tercermin dalam profil pendirinya Muhammadiyah hadir sebagai pendobrak di inspirasikan oleh gerakan pembaharuan Islam di dunia internasional yang ditokohi Jamaludin Al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridho dan lain-lain, Muhammadiyah bergerak menggali nilai-nilai Islam yang benar dan universal sebagai petunjuk hidup dan kehidupan. Kemudian Muhammadiyah berkembang dalam arah gerakan modernis, sebagai *avan grade* masyarakat Indonesia yang sedang bangkit dari tidur panjang selama tiga setengah abad di bawah kolonialisme, sejalan dengan logika modernisme secara akumulatif Muhammadiyah berkembang menjadi jaringan organisasi besar dengan amal usaha yang makin meningkat dalam jumlah dan ragamnya.

Ada dua arah perkembangan Muhammadiyah dalam kerangka kemodernannya, yaitu yang pertama pertumbuhan dan kemajuan ide tentang pertumbuhan *growth* dan kemajuan *progress* merupakan dua kata kunci utama kebudayaan modern yang menggambarkan akumulasi jumlah *quantity* dan peningkatan keragaman *diversity*. Keduanya merupakan rumusan atau turunan

dari ciri utama modernisme dan materialisme Muhammadiyah mencoba menyuntikkan nilai-nilai materialisme ke dalam masyarakat yang telah keropos karena mengaggap kehidupan materi duniawi tidak memiliki nilai-nilai secara religius.

Arah perkembangan kedua adalah sistematisasi, yang merupakan rumusan turunan dari prinsip modernisme, sistematisasi ini tidak mengarah organisasional dengan dibentuknya berbagai majelis dan organisasi otonom melainkan juga dalam kehidupan beragama, mulai di bentuk lembaga untuk mensistematisir pemahaman, pemikiran dan pelaksanaan peribadatan yaitu majelis tarjih dan hasilnya disistematisir dalam sebuah manual himpunan putusan tarjih, kedua terobosan tersebut, pertumbuhan, perkembangan, kemajuan dan upaya membangun masyarakat umat Islam dari masyarakat bodoh, miskin terbelakang dan terjajah hingga menjadi masyarakat yang mandiri, makmur dan berpendidikan.

Dua arah perkembangan tersebut di jadikan oleh organisasi Muhammadiyah dalam kerangka modernisasi dan sistematisasi itu merupakan rumusan untuk memajukan agama Islam yang murni menurut Al-Qur'an dan sunnah. Kerangka pandangan dunia modernis makin lama makin banyak maendapat kritik karena dianggap tidak lagi sesuai, orang-orang modernis dianggap telah melangkah terlalu jauh dengan menjadikan rasionalisme dan materialisme bukan lagi perangkat analisis, melainkan sebagai ideologi, dengan menjadikan materialisme dan rasionalisme sebagai ideologi orang-orang modernis telah mutlak kedua nilai tersebut dan gagal melihat berbagai keterbatasan yang inheren di dalamnya.

Orang-orang Muhammadiyah belum mampu memahami bahwa bentuk gerakan mereka merupakan sebuah hasil pemikirannya untuk mengatasi tuntutan keadaan, kerangka

organisasi modernis hanyalah sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keIslaman dalam konteks masyarakat pada waktu itu, modernisme bisa dikatakan bukan substansi gerakan yang di bangun oleh K.H.A Dahlan hingga kinipun orang lebih mengenal gerakan anti TBC (tahayul, bid'ah, dan curafat) dan bukan gerakan sosial dan budaya.

Prinsip utama gerakan Muhammadiyah merupakan hasil pemahaman terhadap ajaran Islam yang termaktub dalam al-qur'ann dan sunnah hasil pemahaman demikian dirumuskan sebagai pola kelakuan perjuangan muhammadiyah yang kemudian mendorong memberi arah dan bentuk setiap aktifitas Muhammadiyah, keseluruhan dari prinsip perjuangan Muhammadiyah dapat dikelompokkan menjadi empat prinsip gerakan Islam, yaitu (www.muhammadiyah.or.id):

1. Prinsip gerakan sosial
2. Prinsip gerakan dakwah
3. Prinsip gerakan ilmu
4. Prinsip gerakan tajdid

Kehadiran sebuah organisasi sosial keagamaan dengan predikat pembaharu pada dasa warsa kedua, abad kedua puluh ini dipandang sebagai satu kemajuan besar dikalangan umat Islam.. Tradisi keagamaan yang dipengaruhi oleh budaya keraton dan sinkretis, menyebabkan K.H.A. Dhlan memilih pembaharuan sebagai upaya memurnikan ajaran Islam, dengan cara mengembalikannya kepada dua sumber utama yaitu; Al-Qur'an dan As-sunnah.

Sejak Muhammadiyah didirikan "bernawitu" menjadi gerakan Islam sesuai dengan bimbingan Allah dalam A-Qur'an serta teladan Rosulullah dalam fikiran modern yang selaras dengan kedua basis sebelumnya, dengan dasar-dasar tersebut Muhammadiyah mampu menumbuhkan cara

hidup yang dinamik, rasional, dan individualistic serta gaya hidup kota yang duniawi dan mampu mengkombinasikan pola dan metode organisasi barat yang modern dengan prinsip dan nilai Islam mempunyai kepercayaan pada diri sendiri, jadi jelas pilihan yang dijatuhkan, sebagai gerakan tjdid menempati dua sisi mata uang yang sama. Pemurnian Islam dari segala bentuk bid'ah dan kurafat serta penerapan Islam dalam masyarakat dengan pola dan metode modern. Dengan Islam benar Muhammadiyah menjadi kokoh, teguh dan berpribadi dengan ilmu-ilmu modern Muhammadiyah lebih mudah menerapkan Islam dalam kehidupan masyarakat.

Etos Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan Islam terlalu sederhana untuk hanya dikaitkan dengan masalah kekuasaan politik apa lagi jabatan presiden, menteri atau DPR. Karena itu, penting bagi Muhammadiyah untuk tetap konsisten pada jati dirinya sebagai gerakan sosial dan budaya, jika pada satu masa nampak ketergiuran kader gerakan ini pada permainan kekuasaan adalah pertanda dari sebagai pusat keunggulan peradaban, walaupun demikian, bagi muhammadiyah, kekuasaan atau partai politik bukansesuatu yang di pandang tidak penting atu di luar keberadaan dirinya sebagai gerakan sosial atau kebudayaan.

Di dalam dinamika demokrasi politik kebangsaan dan orientasi pad aide masyarakat madani di masa depan peran penting Muhammadiyah justeru terletak psda kemampuan gerakan menempatkan diri sebagai pencerah peradaban sebagai etos gerakannya. Inilah sebenarnya pesan pembaharuan kiayi Ahmad Dahlan, sehingga pada awal kemunculannya ia mampu menyerap berbagai pusat keunggulan pada masanya. Gerakan tersebut mulai berubah lagisetelah mengalami formalisasi

atas pembaharuannya dalam berbagai lembaga dan terutama sesudah pengembangan Tarjih sebagai lembaga fatwa hukum fikih, sejak itu tidak lama pendiri wafat, sebenarnya gerakan ini mulai mengalami proses tradisionalisasi, Muhammadiyah seolah-olah identik dengan tarjih yang kemudian diartikan hanya sebagai lembaga fatwa syariah (fikih).

Formalisasi dan tradisionalisasi itu menjadi lebih hebat sesudah ketertarikan Muhammadiyah terhadap kekuasaan dan permainan politik praktis menjadi semakin besar tidak lama sesudah kemerdekaan, tahun 1945 khususnya bersamaan dengan berdirinya Masyumi, salah satu penyebabnya ialah kekaguman para aktivis Muhammadiyah terhadap keberhasilan kiyai Ahmad Dahlan dalam membangkitkan semangat sosial dan kebudayaan pemeluk Islam, demikian pula keberhasilan kyai Ahmad Dahlan mendorong tumbuhnya berbagai amal usaha atau berbagai lembaga sosial yang terus bertambah hampir tanpa seingat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, pemujaan kebesaran diri itulah kemudian yang menyebabkan aktivisnya merupakan peran sejarah yang bisa dan harus dimainkannya.

Dalam bidang politik, Muhammadiyah memperlihatkan sikap yang beragam suatu saat tampil sebagai pihak yang sangat kritis terhadap pemerintah, tetapi pada saat yang lain tampil sebagai pendukung, bahkan ikut dalam pemerintahan. Pada suatu saat, Muhammadiyah menjadi subordinatif kekuatan politik tertentu, dan pada saat yang lain menjadi organisasi independent yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan parpol apapun. Paham keagamaannya adalah Ahlussunnah Wal Jamaah. Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan tidak akan berubah menjadi partai politik. Akan tetapi, tidak berarti Muhammadiyah buta politik.

Muhammadiyah terus bergerak dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan, namun dalam batas-batas sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf dan nahi munkar, dan tidak bermaksud menjadi partai politik.

Nahdatul Ulama

Nahdatul ulama (NU) lahir pada tanggal 31 januari 1926 di Surabaya, organisasi ini di prakarsai oleh sejumlah ulama terkemuka, yang artinya kebangkitan para ulama, NU didirikan untuk menampung gagasan keagamaan para ulama tradisional, atau sebagai reaksi atas prestasi ideologi gerakan modernisme islam yang mengusung gagasan purifikasi puritanisme, pembentukan NU merupakan upaya peorganisasian dan peran para ulama, pesantren yang sudah ada sebelumnya, agar wilayah kerja keulamaan lebih ditingkatkan, dikembangkan dan di luaskan jangkauannya dengan kata lain didirikannya NU adalah untuk menjadi wadah bagi usaha mempersatukan dan menyatukan langkah-langkah para ulama dan kiai pesantren.

Dalam pandangan NU tidak semua tradisi buruk, usang, tidak mempunyai relevansi kekikiran, bahkan tidak jarang, tradisi biasa memberikan inspirasi bagi munculnya modernisasi islam penegasan atas pemihakkan terhadap "warisan masa lalu " islam di wujudkan dalam sikap bermazhab yang menjadi typical NU, dalam memahami maksud Al-Qur'an dan hadist tanpa mempelajari karya dan pemikiran-pemikiran ulama-ulama besar seperti, Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali hanya akan sampai pada pemahaman ajaran islam yang keliru.

Demikian juga dalam pandangan kiai, hasyim yang begitu jelas dan tegas mengenai keharusan umat Islam untuk memelihara dan menjaga tradisi islam ditorehkan para ulama

klasik. Dalam rangka memelihara system mazhab kiai Hasyim merumuskan gagasan ahlusunnah waljama'ah yang bertumpu pada pemikiran, Abu Hasan al-Asyari, Mansur Al-Maturdi imam Hana fi, Maliki, syafi'I, dan Hambali, serta ima Al-ghozali, Junaid Albaghdadi dan Imam Mawardi.

Pada dasawarsa 1980 dan 1990 terjadi perubahan mengejutkan didalam lingkungan Nahdatul Ulama ormas terbesar di Indonesia. Perubahan yang paling disoroti media massa dan sering menjadi bahan kajian akademis ialah proses kembali ke khittah 1926: NU menyatakan diri keluar dari politik praktis dan kembali menjadi jam'iyah diniyyah, bukan lagi wadah politik, dengan kata lain, sejak muktamar sutibondo (1984) para kiai bebas berafiliasi dengan partai politik manapun mksudnya dengan partai golkar dan menikmati kedekatan pemerintah, NU tidak asing lagi oleh pemerintah, sehingga segala aktifitasnya, pertemuan, seminar tidak lagi dilarang dan malah sering difasilitasi Jadi, dapat di pahami perubahan tersebut merupakan momentum dalam politik orde baru, NU sebagai politik sunni, yang selalu mencari akomodasi dengan penguasa (www.nu.or.id).

Terdapat pula perubahan lainnya dikalangan generasi muda NU terlihat dinamika baru dengan menjamurnya aktivitas sosial dan intelektual, yang nyaris tak tertandingi oleh kalangan masyarakat lain, selama ini NU di anggap ormas yang paling konservatif dan tertutup, dan sedikit sekali punya sumbangan kepada perkembangan pemikiran keagamaan maupun pemikiran sosial dan politik, prihal pemikiran keagamaan NU justru didirikan sebagai wadah para kiai untuk bersama-sam bertahan terhadap garakn pembaharuan pemikiran islm yang di wakili oleh Muhammadiyah, Al-irsyad dan persis, Nu hanya manerima interpretasi islam yang tercantum

dalam kitab kuning "ortodoks" al-kutub al-mu'tabarah, terutama fiqh Syafi'I dan aqidah menurut mazhab asy'ari, dan menekan tklid kepada ulama besar pada masa lalu.

Dengan latar belakang aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan ekonomi di sekitar pesantren yang mulai menjamur pada akhir dasawarsa 1970 dan 1980, muncul wacana-wacana baru, yang berani mempertanyakan interpretasi khazana klasik yang sudah mapan dan mencari relevansi tradisi islam untuk msyarakat yang sedang mengalami perubahan secara cepat, merupakan suatu perkembangan revolusioner, baik daalam aktivitas LSM maupun dalam wacana yang berkembang.

Perhatian mulai bergeser dari para kiai sebagai tonggak organisasi NU kepada massa besar, akar rumput yang merupakan mayoritas jama'ahnya tetapi kepentingannya selama ini lebih sering terabaikan. Dominasi akivitas dan wcana NU dan keturunan mereka (kaum Gus-gus), telah mulai terdobrah, sebagian besar aktivis dan pemikir muda yang memberi nuansa kepada NU pada dasawarsa 1980 dan 1990 tidak berasal dari kasta kiai melainkan dari keluarga awam, yang mengalami mobilitas sosial, tetapi perlu kita dicatat bahwa mereka bias muncul karena mnendapat dukungan dan perlindungan dari sejumlah tokoh muda dari kalangan elit seperti, Fahmi sifuddin, Mustafa bisri, dan Abdurahman Wahid.

Nahdatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Masyumi, tokoh NU, K.H. Hasyim asy'ari terpilih sebagai pimpinan tertinggi masyumi pada saat itu, tokoh-tokoh NU lainnya banyak yang duduk dalam pengurusan Masyumi dank arena keterlibatan NU dalam masalah politik menjadi sulit dihindari. Nahdatul ulama

kemudian keluar dari Masyumi melalui surat keputusan pengurusan besar Nahdatul Ulama (PBBNU) pada tanggal 5 april 1952 akibat adanya pergesekan politik diantara kaum intelektual Masyumi yang ingin melokalisasikan para kiai NU pada persoalan agamanya saja Hubungan antara kedua partai tersebut NU keluar dari partai Masyumi diakibatkan, pergesekan politik kaum intelektual partai Masyumi yang ingin melokalisasi para kiai NU yang mengurus pada persoalan agama saja (Alfian, 2009:200).

Pada masa Orde Baru, sebagaimana berkali-kali disinggung Syabirin, NU memperlihatkan dinamika sosial-politik yang agak berlainan dengan masa-masa sebelumnya. Dalam pemilu 1971, NU berhasil menduduki posisi kedua dibawah GOLKAR dan diatas Parmusi (nama lain Masyumi). Paham teologi yang dianut NU adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, kewajiban mematuhi penguasa yang sah adalah sebagian dari iman. Sepanjang pemerintah tidak mengajak kepada kekufuran, tidak ada alasan untuk membangkang terhadap pemerintah. Dengan demikian, dalam “kamus politik” NU tidak ada kata bughat (memberontak). Jika NU menganggap pemerintah melakukan kesalahan, cara memperbaikinya adalah menegurnya dengan cara yang baik dan mengajak berdialog sebagai perwujudan *wajadilhum billati hiya ahsan* (mengajak kepada kebaikan dengan cara sebaik mungkin).

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)

Masa Orde Lama (1959-1965) tercatat sebagai masa paling gelap dalam sejarah kehidupan kebangsaan Indonesia. Presiden Sukarno mencanangkan Konsepsi Presiden yang secara operasional terwujud dalam bentuk

Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin memusatkan seluruh kekuasaan ditangan Presiden. Para pemimpin nasional Mochtar Lubis, K.H. Isa Anshari, Mr. Assaat, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Boerhanoeddin Harahap, S.H., M. Yunan nasution, Buya Hamka, Mr, Kasman Singodimedjo dan K.H E.Z. Muttaqin yang bersikap kritis terhadap politik Demokrasi terpimpin, ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses pengadilan. Puncak dari masa penuh kegelapan itu ialah pecahnya pemberontakan berdarah G.30.S/PKI.

Sesudah seluruh kekuatan bangsa yang anti komunis bangkit menghancurkan pemberontakan tersebut, datanglah zaman baru yang membawa banyak harapan. Yaitu era Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa inilah, para pemimpin bangsa yang dipenjarakan oleh rezim Orde Lama dibebaskan. Para pemimpin nasionalis-Islami yang pada dasarnya tidak dapat duduk berpangku tangan, seperti Mohammad Natsir dan Prawoto Mangkusasmito mulai merancang gagasan untuk berpartisipasi penuh mendukung pemerintahan Orde Baru. Pada mulanya mereka mengharapkan pemerintah bersedia merehabilitasi Partai Politik Masyumi yang dipaksakan membubarkan diri oleh Presiden Soekarno. Musyawarah Nasional III Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) menyatakan: “bahwa pembubaran Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yuridis formal tidak syah, dan yuridis material tidak beralasan”. Namun, pembubaran Masyumi, ternyata bukanlah masalah hukum semata-mata Pembubaran tersebut adalah masalah politik. Oleh karena itu ketika permintaan tersebut, oleh berbagai pertimbangan tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, tokoh-

tokoh nasionalis-Islami itu tidak *ngotot*, juga tidak berputus harapan (www.dewandakwah.or.id).

Bagi mereka, aktivitas hidup ini semata-mata dalam rangka beribadah dan berdakwah untuk rneraih keridhaan Ilahi. Berkecimpung di lapangan politik, bagi mereka merupakan bagian dari ibadah dan dakwah. Maka ketika mereka tidak lagi mendapat kesempatan untuk berkiprah di lapangan politik, jalan ibadah dan dakwah dalam bentuk lain masih terbuka sangat lebar. Dalam kata-kata Pak Natsir, dulu berdakwah lewat jalur politik, sekarang berpolitik melalui jalur dakwah. Pada 26 Februari 1967, atas undangan pengurus masjid Al-Munawarah, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, para alim ulama dan zu'ama berkumpul untuk bermusyawarah, membahas, meneliti, dan menilai beberapa masalah, terutama yang rapat hubungannya dengan usaha pembangunan umat, juga tentang usaha mempertahankan aqidah di dalam kesimpangsiuran kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Musyawarah menyimpulkan sikap-sikap sosial politik yang akan diusung oleh organisasi yang secara terus menerus dilakukan oleh berbagai kalangan umat, yakni para alim ulama dan para muballigh secara pribadi, serta atas usaha-usaha yang telah dicapai dalam rangka organisasi dakwah. Musyawarah juga memandang perlu lebih ditingkatkan hasil dakwah hingga taraf yang lebih tinggi sehingga tercipta suatu keselarasan antara banyaknya tenaga lahir yang dikerahkan dan banyaknya tenaga batin yang dicurahkan dalam rangka dakwah tersebut.

Musyawarah juga merumuskan program kerja sebagai penjabaran dari landasan kebijaksanaan di atas. Program kerja tiga pasal itu ialah mengadakan pelatihan-pelatihan atau membantu mengadakan pelatihan bagi muballighin dan calon-calon

muballighin; mengadakan *research* (penelitian) atau membantu mengadakan penelitian, yang hasilnya dapat segera diinfaatkan bagi perlengkapan usaha para muballighin pada umumnya; serta menyebarkan aneka macam penerbitan, antara lain buku-buku, brosur, dan atau siaran lain yang terutama ditujukan untuk memperlengkapi para muballighin dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum lainnya, guna meningkatkan mutu dan hasil dakwah. Usaha ini diharapkan dapat mengisi kekosongan-kekosongan di bidang lektur, yang khusus diperlukan dalam masyarakat.

Fokus pembahasan Syabirin pada buku memang mengungkap perlakuan Orde Baru terhadap gerakan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, tetapi organisasi masyarakat Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan NU juga mendapatkan dampak politik yang oleh Syabirin dibahasakan dengan penjinakan terhadap gerakan politik keislaman. Akan tetapi, tidak pula sebatas mengapungkan apa yang terjadi sipanjang Orba berkuasa. Gerakan politik keislaman, hingga buku ini diterbitkan pun (Desember 2014) masih belum menemukan formulasi yang selaras dengan visi semula sebagaimana sempat mengapung dalam Piagam Jakarta.

KEPUSTAKAAN

Buku *Menjinakkan Islam, Strategi Politik Orde Baru* ini mencanumkan 68 buku rujukan, 12 majalah/Surat Kabar, dan tujuh narasumber yang diwawancarai.

TENTANG PENULIS

TABRAN Syabirin, Lc. M. Ag., lahir di Solok (Sumatra Barat) 14 Agustus 1965. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas

Al-Azhar, Kairo-Mesir dan Pascasarjanan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tabrani sempat leboh 10 tahun (1998-2009) menjadi staf pengajar fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena kesibukan dan ketertarikannya di bidang bisnis dan politik, Tabrani meninggalkan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di UIN tersebut. Tahun 2008 bersama Prabowo Subianto, Fadlizon, Ahmad uzani, dan lain-lain Tabrani ikut mendirikan Partai Gerindra. Keterlibatannya sebagai ketua DPP Geindra mengantarkannya sebagai anggota dewan di DPRD I Provinsi Banten periode 2009-2014. Sekarang, selain mengurus sejumlah perusahaannya, Tabrani tetap melakukan kerja akademik seperti penelitian dan mengeditori sejumlah buku tentang perpolitikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfian, M. Alfian. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme*. Jakarta Selatan: Paramadina, 1996.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
- Nai'm, Abdullah Ahmed. *Islam dan Negara Sekular, Mengosiasikan Masa Depan Syari'ah*. Bandung: Mizan, 2007.

Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Piliang, Yasraf Amir. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Bandung: Matahari, 2011.

Pamungkas, Sigit. *Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institut for Democracy and Welfarism, 2011.

Rosenthal, E.I.J. *Political Thought in Medieval Islam*. Cambridge University Press, 1958.

Soleh, A. Khudori (ed.). *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2003.

Taimiyah, Ibn. *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Maroko: Dar al-Faq al-Jadidah, 1991.

Woodward, Mark R. *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*. Bandung: Mizan, 1999.

Website

- www.muhammadiyah.or.id
- www.nu.or.id
- www.dewandakwah.or.id